



SENIN, 29 OKTOBER 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Aset-Aset Tidak Tertata Baik

Awas, Kehilangan WTP!

BENGKULU - Pernyataan Kepala BPKD Provinsi Bengkulu Heru Susanto bahwa ada aset tanah milik Pemprov senilai Rp 5 triliun yang sebagian besar belum ada sertifikatnya menagatkan banyak pihak. Sekda Provinsi Bengkulu H.Nopian Andusti, SE, MT lang-

sung beraksi, dan mengin-
gatkan BPKD untuk men-
ganggarkan biaya pens-
ertifikatan tanah di APBD
2019. "Bukan per OPD
Karena pengelola aset itu
secara keseluruhan ada
di BPKD.
Baca **AWAS**.. Hal 19

Sambungan dari hal 9

Ada beberapa luasan lahan yang belum tersertifikat. Rp 5 triliun itu bukan berarti seluruhnya belum bersertifikat," jelas Nopian.

Dana yang akan dianggarkan nanti, kata Nopian untuk mensertifikatkan lahan milik pemprov di beberapa kabupaten, seperti Seluma, Kepahiang, Bengkulu Tengah dan lainnya.

"Aset kita kan menyebar, di Kepahiang ada, Rejang Lebong ada, Seluma juga ada. Kita tertibkan tapi bertahap," kata Nopian.

Selain aset tanah, sambung Nopian yang juga harus ditata dengan baik adalah aset tidak bergerak yakni barang milik daerah (BMD). "Bicara soal barang milik daerah (BMD), gampang diucapkan tapi sebetulnya san-

gat sulit dan rumit untuk diselesaikan. Dulu kita tidak begitu dituntut untuk tertib. Sekarang banyak aset-aset kita yang tidak tertata dengan baik. Karena kita tidak melakukan manajemen aset dengan baik. Banyak OPD yang belum begitu memahami. Contohnya pinjam pakai BMD. Dulu kemana-mana boleh pinjamkan BMD, termasuk ke pihak swasta. Sekarang tidak boleh lagi, harus hati-hati," demikian Nopian.

Sementara itu, Pemprov diingatkan untuk segera memperbaiki tata kelola aset terutama tanah yang belum bersertifikat. Jangan sampai tahun depan tidak mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Helmi Paman mengatakan bahwa penataan aset salah satu item penilaian

BPK sehingga harus tertata dan terdata.

"Harus dibenahi secepatnya, kalau tidak bisa kehilangan WTP yang sudah diraih. Kalau memang aset itu terbengkalai, aset lama yang belum diinventarisir, pemprov harus menganggarkan di BPKS (Badan Pengelolaan keuangan daerah) untuk mengurus sertifikat supaya statusnya sah," ujar Mulyadi.

Memang, kata Mulyadi penertiban aset tanah ini sifatnya bertahap. Terhadap tanah yang dikuasai oleh masyarakat, pemprov harus berani. "Pemprov harus tegas dan berani. Tapi tetap utamakan persuasif. Mungkin bisa ganti rugi tanam tumbuh. Atau dengan perjanjian hasil dari tanam tumbuh boleh diambil, tapi tanahnya jangan diperjual belikan atau dikuasai," kata Mulyadi. (tew)